

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- _____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983
- Habib Adjie “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, *RENVOL*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009
- K. Bertens, *Etika, Cetakan Kesepuluh*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta. UI Press, 1986
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

II. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.-HT.03.01 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 30-PW.07.1 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.HT.03.01 tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 10/ B/ Mj.PPN/ 2009

III. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Martua Batubara SH., selaku sekretaris MPP, senin 6 Juni 2010, di Kantor MPP, direktorat Administrasi Hukum Umum Dephukham

IV. Internet

www.anggara.org